

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025**



**JL. KAPTEN ANWAR SASTRO PALEMBANG TELP 311517
TAHUN 2025**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi , maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif ”

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2025-2029; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025-2029; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial telah menetapkan sasaran jangka menengah tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- ✓ Meningkatnya pemberdayaan sosial;
- ✓ Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- ✓ Meningkatnya Rehabilitasi sosial
- ✓ Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- ✓ Meningkatnya Rehabilitasi sosial
- ✓ Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
- ✓ Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana
- ✓ Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan

1. Belanja dan Program APBD

a. Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Total Pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.41.076.378.902,-** yang terdiri atas :

Belanja Operasi	: Rp.39.881.818.902.-
➤ <i>Belanja Pegawai</i>	: Rp. 16.940.865.000,- (42,48%)
➤ <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	: Rp. 22.940.953.902,- (57,52%)

Belanja Modal	: Rp.1.194.560.000,-
➤ <i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	: Rp. 674.560.000,- (56,47%)

➤ *Belanja Modal Gedung dan Bangunan* : Rp. 520.000.000,- (43,53%)

b. Program dan Anggaran APBD

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program dan 19 Kegiatan dan 93 sub kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi = **Rp.21.593.143.000,-**
- b) Program Pemberdayaan Sosial = **Rp.357.851.000,-**
- c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan = **Rp.36.180.000,-**
- d) Program Rehabilitasi Sosial = **Rp.9.785.030.000,-**
- e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial = **Rp.8.270.174.902,-**
- f) Program Penanganan Bencana = **Rp.936.000.000,-**
- g) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan = **Rp.98.000.000,-**

2. Indikator Kinerja Dinas Sosial (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Indeks Kesejahteraan Sosial target 57,22%

3. Kegiatan Dinas Sosial Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

- a) Kota Palembang
Terdapat 11 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :
 - 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
 - 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 - 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 - 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - 5. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Panti
 - 6. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis didalam Panti
 - 7. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 8. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - 9. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 - 10. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - 11. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

- b) Kota Lubuklinggau

Terdapat 6 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

c) Kota Pagar Alam

Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Pagar Alam , antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

d) Kota Prabumulih

Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kota Prabumulih , antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

e) Kabupaten Musi Rawas

Terdapat 7 kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas , antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
4. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
6. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

f) Kabupaten OI

Terdapat 8 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OI, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar didalam Pant
4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS didalam pant
5. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
6. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
7. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

g) Kabupaten Banyuasin

Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Banyuasin , antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

h) Kabupaten Musi Banyuasin

Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Musi Banyuasin , antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Pant
3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

i) Kabupaten Muara Enim

Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Muara Enim , antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Pant
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

j) Kabupaten Empat Lawang

Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Empat Lawang, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- k) Kabupaten Lahat
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Lahat , antara lain sbb :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- l) Kabupaten OKI
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OKU, antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
- m) Kabupaten OKU
Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. OKU , antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
 5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- n) Kabupaten OKUS
Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.OKUS , antara lain sbb :
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
 2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- o) Kabupaten OKUT

Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.OKUT , antara lain sbb :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

p) Kabupaten Pali

Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Pali , yaitu :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

q) Kabupaten Muratara

Terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan di Kab.Muratara , yaitu :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : 000.7.2.8/0385/Bappeda-V/2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan masukan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan IV pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

A. Perbandingan antara Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
--------	------	-------------------------	--------------	-----------

Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan

APBD Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

	Anggaran (Rp)		Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Target s.d. Akhir Tahun	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	Rp.41.076.378.902-	Rp.37.550.772.283,44,-	100,00	91,42	100,00	100,00
Belanja Operasi	Rp.39.881.818.902,-	Rp.36.371.104.736-	100,00	91,20	100,00	100,00
Belanja Modal	Rp.1.194.560.000,-	Rp.1.179.667.547,44,-	100,00	98,75	100,00	100,00

1. Realisasi Belanja Dinas Sosial dana APBD Provinsi Sumatera Selatan;

a) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.37.550.772.283,44,- atau 91,42% dan realisasi fisik 100 %.

b) Realisasi Belanja (Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer)

Belanja Operasi pagu Rp.39.881.818.902,- realisasi keuangan Rp.36.371.104.736,- atau 91,20% dan fisik 100 %

- Belanja Pegawai Pagu Rp. 16.940.865.000,- realisasi keuangan Rp.14.473.939.647,- atau 85,44% dan fisik 100 %
- Belanja Barang dan Jasa pagu Rp.22.940.953.902,- realisasi keuangan Rp.21.897.165.089,- atau 95,45% dan fisik 100 %

Belanja Modal Pagu Rp.1.194.560.000,- realisasi keuangan Rp.1.179.667.547,44,- atau 98,75% dan fisik 100%

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pagu Rp.674.560.000,- realisasi keuangan Rp.673.148.867,- atau 99,79 % dan fisik 100 %
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan pagu Rp.520.000.000,- realisasi keuangan Rp.506.518.680,44,- atau 97,41% dan fisik 100%

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Target s.d. Akhir Tahun	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	Rp.41.076.378.902-	Rp.37.550.772.283,44,-	100,00	91,42	100,00	100,00
Belanja Operasi	Rp.39.881.818.902,-	Rp.36.371.104.736,-	100,00	91,20	100,00	100,00
Belanja Pegawai	Rp.16.940.865.000,-	Rp.14.473.939.647,-	100,00	85,44	100,00	100,00
Belanja Barang dan	Rp.22.940.953.902,-	Rp.21.897.165.089,-	100,00	95,45	100,00	100,00

Jasa						
Belanja Modal	Rp.1.194.560.000,-	Rp.1.179.667.547,44,-	100,00	98,75	100,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.674.560.000,-	Rp.673.148.867,-	100,00	99,79	100,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.520.000.000,-	Rp.506.518.680,44,-	100,00	97,41	100,00	100,00

c. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 yang tercantum pada :

Perbandingan Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk target tahun 2025 adalah :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase(%)	57,22%	57,63%	100,72%

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang tercapai yaitu :

1. Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target 57,22% realisasi 57,63%.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 secara umum penyerapan anggaran telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian utama Dinas Sosial dalam percepatan pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

b. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dinas Sosial dalam percepatan pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan

\$_{ttd_pengirim}

Prof. Dr.H.Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP.19660609 1995121001